

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada no. 8 Jakarta 10120
Telp. (62-21) 63858269-70 Fax. (62-21) 6302109

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat BAPETEN tahun 2013 ini disusun guna melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang wajib menyusun LAKIP bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas sebagai Pengawas Intern yang merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAKIP Inspektorat Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2010-2014. Pada LAKIP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat pada tahun 2012.

Dengan tersusunnya LAKIP Inspektorat Tahun 2013 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat dan menjadi pijakan dalam meningkatkan kapasitas Inspektorat, sehingga dapat memberikan dukungan dalam rangka mewujudkan cita-cita Lembaga untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualain.

Jakarta, Januari 2013

Kepala Inspektorat,

Ir. Andajani Muljanti

NIP. 19581128 198603 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I. 1. Latar Belakang | 1 |
| I. 2. Landasan Hukum | 1 |
| I. 3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| I. 4. Gambaran Umum | 2 |
| I. 5. Sistematika Penyusunan LAKIP | 4 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| II. 1. Rencana Strategik | 5 |
| II. 2. Indikator Kinerja Utama | 6 |
| II. 3. Rencana Kinerja Tahunan 2012 | 6 |
| II. 4. Penetapan Kinerja | 7 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| III. 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan | 8 |
| III. 2. Akuntabilitas Keuangan | 14 |
| BAB IV PENUTUP | 16 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat merupakan unit organisasi sebagai unsur pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN dan secara administrasi di bawah koordinasi Sekretaris Utama.

Dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP Inspektorat ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat pengawasan intern. LAKIP Inspektorat (Eselon II) ini disusun rutin sekali dalam setahun, dan digunakan sebagai bahan masukan unit Eselon I dalam menyusun LAKIP dan sekaligus juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan Bapeten untuk mengambil keputusan, khususnya dalam upaya pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan.

I. 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;

- d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

I. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Inspektorat Bapeten adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Bapeten atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Bapeten.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Inspektorat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Bapeten.

I. 4. Gambaran Umum

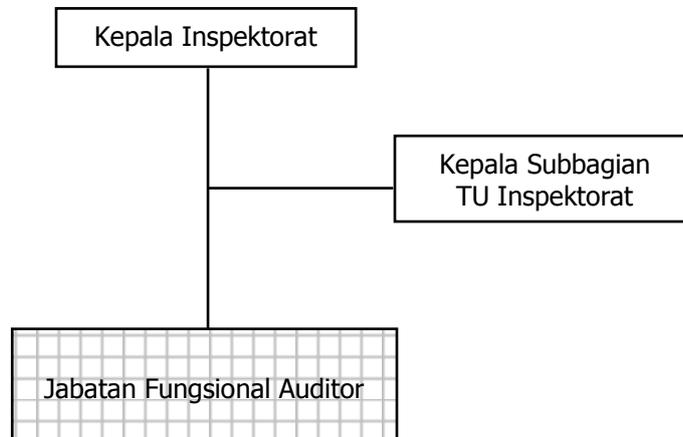
Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat bertugas untuk melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan urusan ke Tata Usaha dan Kebersihan Inspektorat.

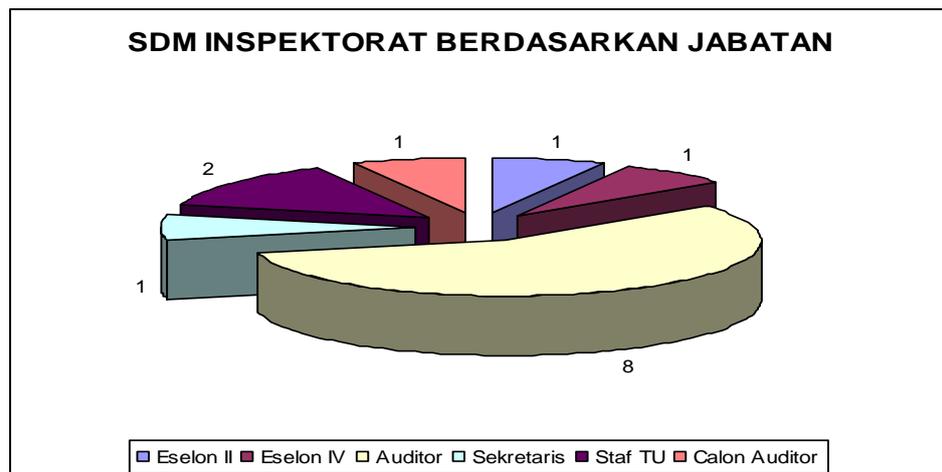
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, Inspektorat memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 1. Organisasi Inspektorat



Inspektorat BAPETEN pada tahun 2012 didukung mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 14 (*empat belas*) orang, dengan rincian berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan.

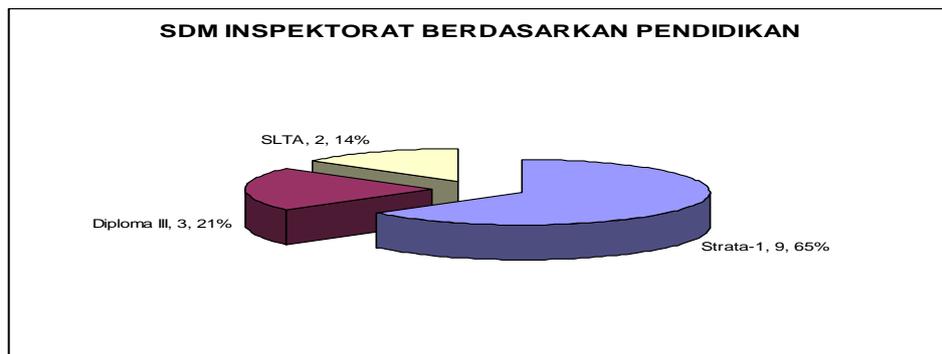
Gambar 2. Berdasarkan Jabatan



Gambar 3. Berdasarkan Golongan



Gambar 4. Berdasarkan Pendidikan



I. 5. Sistematika Penyusunan LAKIP

Laporan Kinerja Inspektorat BAPETEN terdiri dari :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum, dan sistematika penyusunan lakip.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Rencana Sratejik, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, dan penetapan kinerja 2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Pencapaian Sasaran, dan akuntabilitas keuangan Inspektorat.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan menguraikan kendala dan langkah-langkah peningkatan kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran Kinerja Kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

II. 1. Rencana Strategik

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan intern diselaraskan dengan arah kebijakan dan program BAPETEN yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPETEN 2010 – 2014 dalam menunjang program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BAPETEN lainnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkan BAPETEN menuju pemerintahan yang baik dan bebas KKN yang tertuang secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi Inspektorat merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi

Terwujudnya zero temuan unit kerja

Misi

Melakukan pengawasan intern sesuai dengan kode etik dan standar audit dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

II. 2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan kunci faktor keberhasilan berupa indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai tahun 2012. Indikator Kinerja Utama Inspektorat diselaraskan dengan Indikator Kinerja Bapeten yaitu Tingkat Opini Laporan Keuangan, Tingkat Penilaian akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, persentase pejabat yang menandatangani Pakta integritas dan penetapan kinerja.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat :

- a. Berkurangnya jumlah temuan audit Pengadaan Barang dan jasa
- b. Jumlah temuan audit barang/jasa yang sudah ditindaklanjuti
- c. Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja
- d. Jumlah temuan audit kinerja yang sudah ditindaklanjuti
- e. Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP
- f. Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat "**baik**"

II. 3. Rencana Kinerja Tahunan 2012

Tahun 2012 Inspektorat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

- a. **Audit**, Inspektorat melaksanakan audit kepegawaian, audit kinerja, dan audit Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. **Reviu**, Inspektorat melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun Anggaran 2012.
- c. **Evaluasi**, Inspektorat melaksanakan Evaluasi Lakip Eselon I dan II.

- d. **Pemantauan**, Inspektorat melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Audit Intern Inspektorat, serta Pelaksanaan Penyusunan Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
- e. **Pembinaan**, Inspektorat melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Inspektorat.

II. 4. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Inspektorat pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2012 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan

Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan merupakan bagian terpenting dari komitmen Inspektorat dalam menjalankan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Capaian sasaran Inspektorat Tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

- Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa dan Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Pencapaian (Persen) |
|--|--------|-----------|--------------------------------|
| Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa | 25% | 28,57% | 114,29% |
| Jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa yang sudah ditindaklanjuti | 100% | 82,14% | 82,14% |

Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa disebabkan oleh penerapan tindakan *early warning system* dan *counseling partner* Inspektorat untuk mencegah penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Temuan-temuan tersebut umumnya terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan dan proses pengadaan. Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa berkurang sebesar 28,57%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan jumlah temuan audit pengadaan barang/ jasa TA. 2011 sebanyak 7 temuan sedangkan jumlah temuan audit TA. 2012 sebanyak 5 temuan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti baik berupa administratif maupun

kerugian negara atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk itu dari tahun 2010 sampai dengan TA. 2012 jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa yang sudah ditindaklanjuti sebesar 82,14% yang terdiri dari 28 jumlah temuan dengan 23 temuan sudah ditindaklanjuti, dengan adanya kegiatan tindaklanjut tersebut dapat diketahui perkembangan status selesai/tidaknya suatu temuan. Tidak tercapainya target dikarenakan temuan melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut belum menyelesaikan temuan yang ada.

Sasaran 2

• Terwujudnya tertib administrasi dalam penggunaan anggaran

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Pencapaian (Persen) |
|--|--------|-----------|--------------------------------|
| Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja | 25% | 33,33% | 133,33 |
| Jumlah temuan audit kinerja yang sudah ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |

Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja disebabkan oleh penerapan tindakan *early warning system* dan *counseling partner* yang dilakukan Inspektorat untuk mencegah penyimpangan yang terjadi atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Temuan-temuan tersebut umumnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2012 terdapat jumlah temuan audit kinerja berkurang sebesar 33,33%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan jumlah temuan audit kinerja TA. 2011 sebanyak 15 temuan sedangkan jumlah temuan audit TA. 2012 sebanyak 10 temuan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti hanya bersifat administratif atas pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlah temuan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi sudah ditindaklanjuti sebesar 100% dengan adanya kegiatan tindaklanjut tersebut dapat diketahui perkembangan status selesai/tidaknya suatu

temuan dan merupakan perbaikan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Sasaran 3

- Terwujudnya pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Pencapaian (Persen) |
|--|--------|-----------|--------------------------------|
| Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | 3 | 3 | 100 |

Tujuan reviu adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta akurasi, kehandalan dan keabsahan Laporan Keuangan telah terpenuhi.

Inspektorat telah melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Bapeten, dan 3 unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sekretariat Utama, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, dan Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reviu adalah waktu yang diberikan sangat singkat (mendesak) sehingga dikhawatirkan tidak dapat maksimal, Inspektorat mensiasati dengan membentuk tim dalam melaksanakan reviu, sehingga dengan waktu dan personil yang ada diharapkan dapat optimal.

Sasaran 4

- Terwujudnya akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Pencapaian (Persen) |
|--|--------|-----------|--------------------------------|
| Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat " <i>baik</i> " | 17 | 10 | 58,82 |

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Inspektorat melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Eselon I dan II, sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi terhadap LAKIP BAPETEN. Hasil evaluasi oleh Inspektorat akan digunakan Kemenpan dan RB sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan nilai interpretasi terhadap LAKIP BAPETEN.

Dari 1 unit Eselon III (UPT), 13 unit Eselon II, dan 3 unit Eselon I yang menyusun LAKIP TA. 2011 terdapat 10 unit kerja yang minimal berpredikat baik. Secara umum kelemahan yang ada pada LAKIP di tahun 2012 adalah adanya ketidaksesuaiannya antara Renstra dengan LAKIP, dan belum seragamnya format baku dalam penyusunan LAKIP. Inspektorat dalam melakukan evaluasi menggunakan pedoman yang telah diterbitkan Kemen PAN dan RB, yaitu PermenPAN Nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, bahwa bobot nilai untuk Perencanaan Kinerja sebesar 35%, Pengukuran Kinerja sebesar 20%, Pelaporan Kinerja sebesar 15%, dan Pencapaian Kinerja sebesar 20%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat, secara reguler dilakukan evaluasi kinerja dengan cara melakukan pengukuran keluaran yang ditetapkan dan bersifat outcome yang dijelaskan dalam analisis kinerja.

Analisis kinerja menjelaskan tentang capaian kegiatan dari setiap sasaran dari program yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Rincian sasaran tahun 2012 yang ditetapkan untuk Inspektorat.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2012

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase Pencapaian (Persen) |
|----|--|---------|--------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa | Persen | 25% | 28,57% | 114,29 |
| 2 | Jumlah temuan audit pengadaan brg/jasa yang sudah ditindaklanjuti | Persen | 100% | 82,14% | 82,14 |
| 3 | Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja | Persen | 25% | 33,33% | 133,33 |
| 4 | Jumlah temuan audit kinerja yang sudah ditindaklanjuti | Persen | 100% | 100% | 100 |
| 5 | Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | Laporan | 3 | 3 | 100 |
| 6 | Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat " <i>baik</i> " | Unit | 17 | 10 | 58,82 |

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Inspektorat adalah sebesar 98.09% persen. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Indikator : Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa.

Pada tahun 2012 terdapat jumlah temuan audit pengadaan barang/ jasa berkurang sebesar 114,29%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan jumlah temuan audit pengadaan barang/ jasa TA.2011 sebanyak 7 temuan sedangkan jumlah temuan audit TA.2012 sebanyak 5 temuan.

2. Indikator : Jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa yang sudah ditindaklanjuti.

Akumulasi temuan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 28 temuan, dan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 23 temuan dengan persentase sebesar 82,14%.

3. Indikator : Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja.

Pada tahun 2012 terdapat jumlah temuan audit kinerja berkurang menjadi sebesar 33,33%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan jumlah temuan audit kinerja TA.2011 sebanyak 15 temuan sedangkan jumlah temuan audit TA.2012 sebanyak 10 temuan.

4. Indikator : Jumlah temuan audit kinerja yang sudah ditindaklanjuti.

Akumulasi temuan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 29 temuan, dan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 29 temuan dengan persentase sebesar 100%.

5. Indikator : Jumlah Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Tahun 2012 jumlah Satker yang telah menyusun laporan keuangan sudah tercapai dengan baik dengan tingkat pencapaian sebesar 3 Satker atau persentase capaian sebesar 100 persen.

6. Indikator : Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat "baik".

Pelaksanaan evaluasi Lakip Tahun 2012 jumlah Akuntabilitas Kinerja unit kerja tahun 2011 yang minimal berpredikat baik sebanyak 10 unit kerja yang terdiri dari Lakip Eselon I dan II atau persentase capaian sebesar 58,82 persen. Namun demikian masih terdapat unit kerja yang belum memenuhi target hal ini disebabkan unit kerja tersebut belum memenuhi kriteria dalam evaluasi Lakip sesuai dengan peraturan Permenpan No. 25 Tahun 2012.

III. 2. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan output kegiatan di Inspektorat tahun 2012 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Pagu | | Realisasi (Rp) | Presentase Capaian |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Awal (Rp) | Revisi (Rp) | | |
| I. | Pengawasan Internal | 675.000.000 | 433.030.000 | 429.690.400 | 99,23 |
| | 1. Audit | 300.018.000 | 172.913.000 | 171.241.300 | 99,03 |
| | 2. Reviu | 129.212.000 | 80.367.000 | 79.588.000 | 99,03 |
| | 3. Evaluasi | 30.950.000 | 17.720.000 | 17.548.500 | 99,03 |
| | 4. Pemantauan | 214.820.000 | 162.030.000 | 161.312.600 | 99,56 |
| II. | Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal | 225.000.000 | 192.475.000 | 188.940.900 | 98,16 |
| | Jumlah | 900.000.000 | 625.505.000 | 618.631.300 | 98,90 |

Total anggaran yang dikelola Inspektorat pada tahun 2012 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Jumlah tersebut direvisi akibat adanya penghematan (efisiensi) menjadi Rp. 625.505.000,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 618.631.300,- (enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,90%.

Tidak tercapainya 100% penyerapan atau realisasi anggaran Inspektorat tahun 2012 disebabkan oleh terjadinya penghematan (efisiensi) anggaran Inspektorat berasal dari: (1) Honor Output Kegiatan; (2) anggaran penyelenggaraan finalisasi penyusunan Laporan Evaluasi LAKIP; (3) Finalisasi penyusunan Laporan Hasil Audit TW. IV; dan (4) anggaran belanja perjalanan lainnya untuk uji petik audit kinerja; (5) Bimbingan Teknis JFA, Reviu beserta dengan honor narasumbernya.

Tabel Realisasi Keuangan

| No. | Judul Kegiatan | Rupiah>Nama Output | | Tingkat Capaian Kegiatan % | Keterangan |
|-----------------------------------|--|--------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | Pengawasan Internal | Anggaran | Rp. 433.030.000 | 99,23 | 14 LHA, 2 LHR LK BAPETEN, 1 LHE LAKIP, dan 2 LH pemantauan |
| | | Output | Laporan Pengawasan Intern | 98,09 | |
| 2 | Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal | Anggaran | Rp. 192.475.000 | 98,16 | 1 Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal |
| | | Output | Dokumen Pengembangan Sistem Pengendalian Internal | 100 | |
| CAPAIAN REALISASI ANGGARAN | | | Rp. 625.505.000 | 98,90 | |
| CAPAIAN REALISASI OUTPUT | | | | 99,04 | |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat tahun 2010–2014 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2012.

Rata-rata persentase pencapaian kinerja Inspektorat adalah sebesar 98,09 %. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Inspektorat mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Jumlah tersebut direvisi akibat adanya penghematan (efisiensi) sebesar 30,5% menjadi Rp. 625.505.000,- (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 618.631.300,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,90%. Berdasarkan tabel di atas, realisasi telah melampaui batas yang telah ditentukan dalam penyerapan di BAPETEN yakni sebesar 95%.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik dan cermat sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RAB dan RKAKL) yang berdampak pada penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti ruang kerja untuk menyimpan dokumen yang masih sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Tahun 2012, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara efektif dan selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan pengetahuan SDM dilakukan lebih intensif melalui pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pendampingan kegiatan pengawasan dengan instansi pembina (BPKP) maupun instansi lainnya.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, mengingat hasil pengawasan merupakan dokumen penting dalam rangka perbaikan kinerja BAPETEN.

| PENETAPAN KINERJA | | |
|--|--|---|
| INSPEKTORAT | | |
| Unit Kerja | : | Inspektorat |
| Tahun | : | 2012 |
| Program | : | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) |
| Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa | 25 Persen |
| | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100 Persen |
| Terwujudnya tertib administrasi dalam penggunaan anggaran | Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja | 25 Persen |
| | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100 Persen |
| Terwujudnya pengukuran pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah | Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | 3 Laporan |
| Terwujudnya akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi | Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat " baik " | 17 Unit |
| Jumlah Anggaran Tahun 2012 | : | Rp. 900.000.000,00 |
| | | Jakarta, Januari 2012 |
| | | Kepala Inspektorat |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Ir. Andajani Miljanti |
| | | NIP. 19581128 1986032001 |

| RENCANA KINERJA TAHUNAN | | |
|--|--|------------|
| INSPEKTORAT | | |
| Unit Kerja | : Inspektorat | |
| Tahun | : 2012 | |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) |
| Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa | 25 Persen |
| | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100 Persen |
| Terwujudnya tertib administrasi dalam penggunaan anggaran | Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja | 25 Persen |
| | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100 Persen |
| Terwujudnya pengukuran pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah | Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | 3 Laporan |
| Terwujudnya akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi | Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat " baik " | 17 Unit |

| LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----|--|---|---|
| INSPEKTORAT - BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | | | | | | | | | | | |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | PENYERAPAN ANGGARAN | | | CAPAIAN KETERANGAN | KETERANGAN / ALAT UKUR | |
| | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN (SASARAN) | TARGET | REALISASI | % | | | |
| 1 | Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa | Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa | TW 1 | 6.25 | 6.25 | 25 | 25 | 25 | Bimtek tentang Pengadaan B/J, Bimtek Audit Pengadaan B/J, Uji Petik Audit, Rapat Internal, Pelaksanaan Audit, Klarifikasi terhadap | Laporan Hasil Audit Pengadaan B/J | |
| | | | TW 2 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 18.75 | 18.75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Jumlah temuan audit pengadaan barang/jasa yang sudah ditindaklanjuti | TW 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | Menyusun Rencana Aksi TL, Rapat Internal, Rapat Koordinasi dengan pihak terkait, Penyusunan | Laporan Hasil Pemantauan TL Rekomendasi LHA pengadaan B/J |
| | | | TW 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Terwujudnya tertib administrasi dalam penggunaan anggaran | Berkurangnya jumlah temuan audit unit kerja | TW 1 | 6.25 | 6.25 | 25 | 25 | 25 | Bimtek tentang Audit Kinerja, Uji Petik Audit, Rapat Internal, Pelaksanaan Audit, Klarifikasi terhadap | Laporan Hasil Audit Kinerja | |
| | | | TW 2 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 18.75 | 18.75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Jumlah temuan audit unit kerja yang sudah ditindaklanjuti | TW 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Menyusun Rencana Aksi TL, Rapat Internal, Rapat Koordinasi dengan pihak terkait, Penyusunan | Laporan Pemantauan TL Hasil Audit Kinerja | |
| | | | TW 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 3 | Terwujudnya pengukuran pengukuran pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah | Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | TW 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Bimtek Reviu LK, Rapat Internal, Rapat koordinasi tripartit, Pelaksanaan Reviu LK, Penyusunan Laporan Reviu LK | Laporan Hasil Reviu LK | |
| | | | TW 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi | Jumlah akuntabilitas unit kerja yang minimal berpredikat "baik" | TW 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Bimtek Penyusunan LAKIP, Bimtek Evaluasi AKIP, Rapat Internal, Rapat Koordinasi, Pelaksanaan | Laporan Hasil Evaluasi AKIP | |
| | | | TW 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | TW 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | | | TW 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | Kepala Inspektorat, | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ir. Andajani Muljanti | | |
| | | | | | | | | | NIP. 19581128 198603 2 001 | | |